



Implementasi KPBU dalam Mendukung Kemajuan Daerah

Surabaya, 2 Maret 2020

*Astu Gagono Kendaro
Kepala Subdirektorat Rancang Bangun I
Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun (KPSRB)*



Outline

1

HIGHLIGHT RPJMN 2020-2024: INFRASTRUKTUR

2

MEKANISME DAN PROSEDUR KPBU

3

**USULAN TINDAK LANJUT PROSES IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK KPBU DAERAH**



1 *HIGHLIGHT* RPJMN 2020-2024: INFRASTRUKTUR



RPJMN 2020-2024

Penterjemahan Visi Presiden-Wakil Presiden Terpilih



**ARAHAN
UNTUK
MENCAPAI
VISI
Indonesia
2045**

5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 AGENDA PEMBANGUNAN

1		Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan <u>Berkualitas</u>
2		Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3		SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4		<u>Revolusi Mental</u> dan <u>Pembangunan Kebudayaan</u>
5		Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6		Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7		Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) Layak dan Aman
- Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- Waduk Multiguna Modernisasi Irigasi

INFRASTRUKTUR EKONOMI

Konektivitas

- Tol Laut + Antarmoda
- Konektivitas Darat**
Jalan tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, pelabuhan Penyeberangan baru
- Konektivitas Kereta Api**
KA Cepat, KA Angkutan Barang
- Konektivitas Laut**
Jaringan Pelabuhan Utama (hub)
- Konektivitas Udara**
Bandara baru, Jembatan udara

Sektor Ekonomi

- Industri Pengolahan**
- Jasa Modern dan Pariwisata**
- Pertanian-Perkebunan-Kelautan Perikanan**

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- Pembangunan Transportasi Perkotaan**
- Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan**
- Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan**
- Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah Domestik) Perkotaan**
- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan**

INFRASTRUKTUR LINTAS AGENDA



Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan



Infrastruktur TIK untuk Transformasi Digital

Pengarusutamaan



Kesetaraan Gender



Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Pembangunan Berkelanjutan



Modal dan Sosial Budaya



Transformasi Digital



Ketahanan Bencana



SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020 - 2024



INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

70%
Rumah Tangga Menempati Hunian Layak [2018 : 54%]

100%
Hunian dengan Akses Air Minum Layak [2018 : 88%]

90%
Hunian dengan Akses Sanitasi Layak [2018 : 75%]

30%
Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaian

500 Ribu ha
Jaringan Irigasi Baru [2015-2018 : 1 Juta ha]

50 m³/detik
Tambahkan Air Baku Industri & Domestik [2015-2018 : 25 m³]

63
Waduk Multiguna [2015-2019 : 16 Waduk]

3 m³/kg
Produktivitas Air untuk Padi

20 Provinsi
Berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana



INFRASTRUKTUR EKONOMI

KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung

Kereta Api Makassar - Parepare

Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu

43 Rute Jembatan Udara [2019: 124 Rute]

21 Bandara Baru

2.500 km
Jalan Tol Barudan/atau beroperasi [2015-2019 : 1.461 km]

3.000 km
Jalan Nasional Baru [2015-2019 : 3.387 km]

97%
Kondisi Mantap Jalan Nasional [2019 : 94%]

1,9 jam/100 km
Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau [2019 : 2,3 Jam/100 km]

27%
Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (loop) [2019 : 23% Loop]



INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di **6 Wilayah Metropolitan**

Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik **80% Penanganan 20% Pengurangan**



TRANSFORMASI DIGITAL

95% Desa
Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar [2019 : 82%]

60% Kecamatan
Cakupan Jaringan Serat Optik [2019 : 35,7%]

80% Populasi
Terjangkau Siaran Digital

3 Unicorn Baru
Start Up



ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

4 Juta
Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota [2019 : 0,5 juta sambungan rumah]

1.400 kWh
Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional [2019 : 1.071 kWh]

~ 100%
Rasio Elektrofikasi

6 Unit
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 GRR dan 4 RDMP)



Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur 2020 - 2024



INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR



Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)



Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)



Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)



Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis



18 Waduk Multiguna



Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

INFRASTRUKTUR EKONOMI



Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu



KA Makasar-Pare Pare



Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung



KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)



Jalan Trans Papua Merauke-Sorong



Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan



Jembatan Udara 37 Rute di Papua



Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan



Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

INFRASTRUKTUR LINTAS AGENDA



Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan



Infrastruktur TIK untuk Transformasi Digital



Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 Kms dan Gardu Induk 38.000 MVA



Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak



Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital

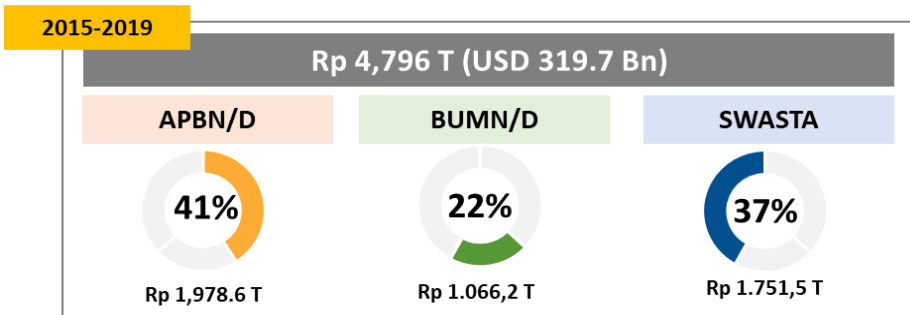
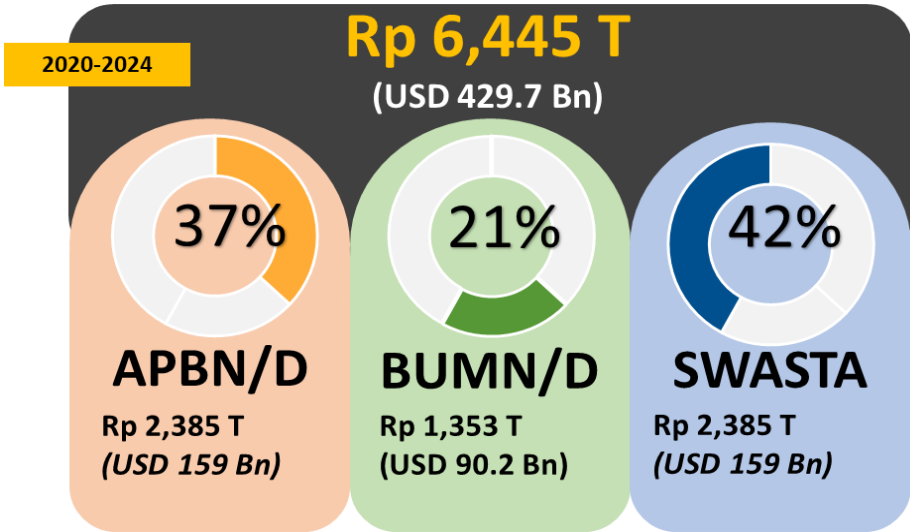
--- Proyek Daerah



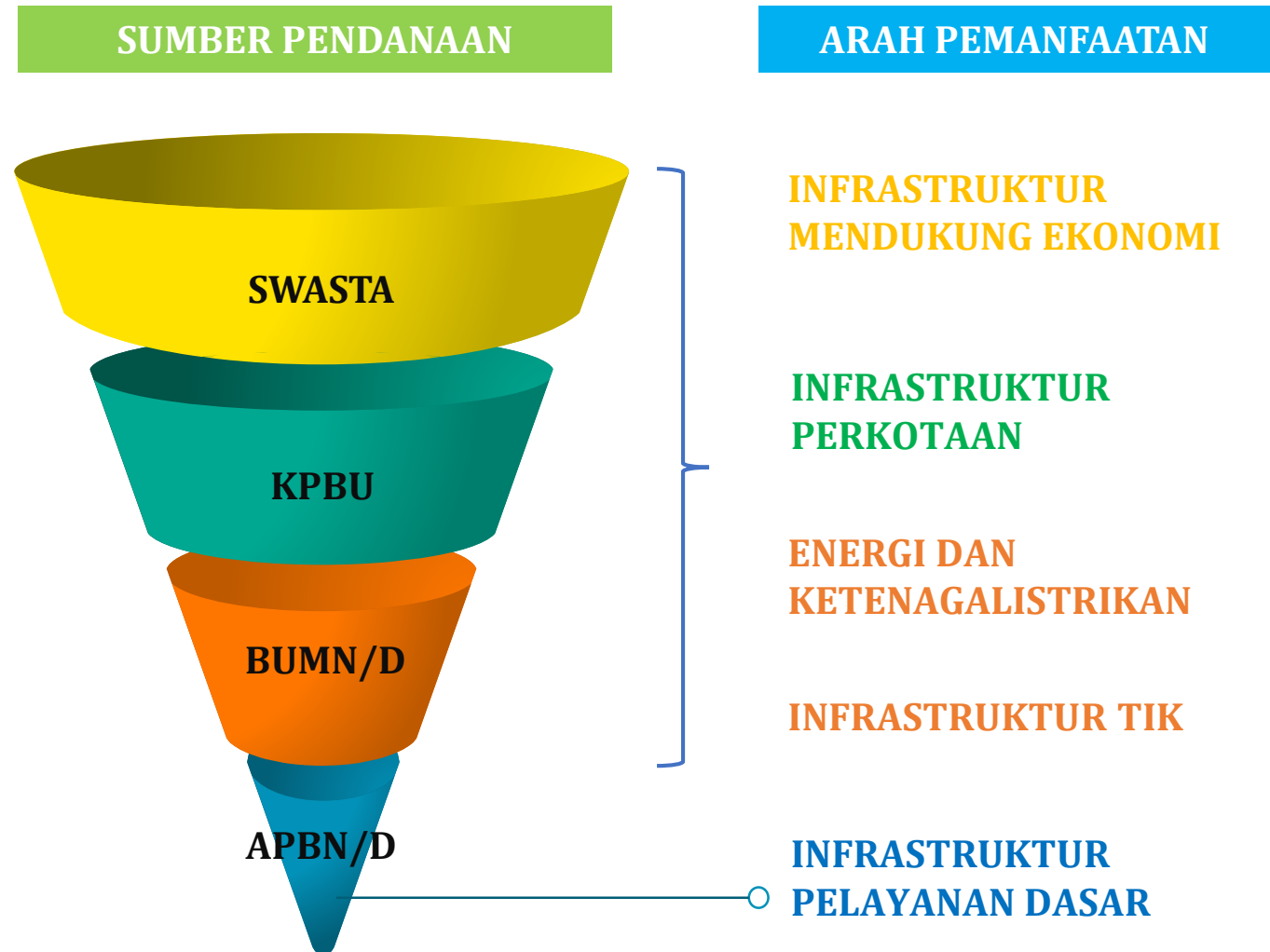
PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA



Kerangka Pendanaan Infrastruktur 2020-2024



- Dalam rangka meningkatkan stok infrastruktur dari 43% GDP (di 2017) memendekati 50% GDP (di 2024), Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur Rp 6,445 T.
- Nilai investasi tersebut meningkat 34.3% dari Rp 4,796 T (USD 319.7 Bn) di 2015-2019.





Contoh Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur dan Indikasi Pendanaan dalam RPJMN 2020 - 2024

No	Nama Proyek	Investasi	Skema Pendanaan	Manfaat
1	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	118,8 T	APBN, APBD, Badan Usaha	Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar)
2	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	54,9 T	APBN, KPBU, APBD	<ul style="list-style-type: none">• Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon• Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)
3	18 Waduk Multiguna	92,9 T	APBN, KPBU, Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW• Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan• Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI
4	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	140,9 T	APBN, APBD, Masyarakat/ Swasta	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%
5	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	123,5 T	APBN, APBD, Masyarakat/ Swasta	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%
6	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	397,9 T	APBN, APBD, Masyarakat/ Swasta	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh• Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota)

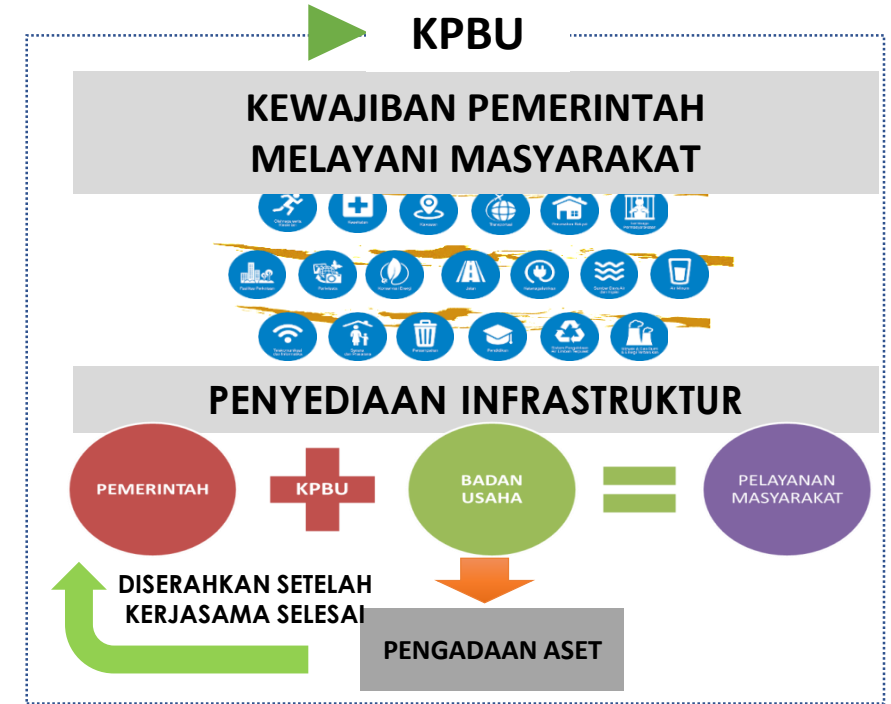
A light gray map of Indonesia is centered in the background of the slide. The map shows the main islands and surrounding archipelago.

2

MEKANISME DAN PROSEDUR KPBU



- Bukan privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsesi
- Dapat berupa kegiatan yang memiliki arus pendapatan (palapa ring), tidak memiliki pendapatan (jalintim)



POKOK PEMAHAMAN				
KERJASAMA	KEPENTINGAN UMUM	SPEKIFIKASI YG TELAH DITETAPKAN	SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SUMBER DAYA BADAN USAHA	PEMBAGIAN RISIKO

Manfaat KPBU:

On schedule, on budget, on service

- Kesenambungan perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
 - Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
- Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang lebih banyak



Pengadaan Konvensional VS KPBU

PENGADAAN KONVENSIONAL

- Sering terjadi ketidaksinambungan karena perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dilakukan secara terpisah serta dilakukan tender tahun untuk pengoperasian/pemeliharaan

TIDAK TERKOORDINASI

- Sering terjadi keterlambat pelaksanaan pekerjaan dan hal tersebut menjadi beban pemerintah (*cost overrun*)

KETERLAMBATAN

- Perencanaan pengadaan tidak mengkaji aspek hukum, komersial, risiko, dan lingkungan

KAJIAN TIDAK LENGKAP

- Investasi 100% oleh pemerintah sehingga risiko 100% ditanggung pemerintah

RISIKO OLEH PEMERINTAH

- Alokasi proyek kurang sesuai dengan nilai proyek yang dilaksanakan

COST OVERRUN

PENGADAAN SKEMA KPBU

- Terjadi kesinambungan (perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan satu kesatuan dalam kontrak jangka panjang)

KOORDINASI YANG BAIK

- Badan usaha melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi keterlambatan konstruksi dan operasi

ON SCHEDULE

- Outline Bussiness mengkaji aspek hukum, komersil, risiko, dan lingkungan

KAJIAN LENGKAP

- Berbagi risiko antara pemerintah dan swasta

BERBAGI RISIKO

- Dengan alokasi yang relatif sama, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak

EFEKTIVITAS BIAYA



Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Aspek	Pengaturan	
	<u>Pemerintah</u>	<u>Badan Usaha</u>
Subyek Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri 2. Kepala Lembaga 3. Kepala Daerah 4. BUMN/BUMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMN/BUMD 2. Badan Usaha Asing 3. Perseroan Terbatas 4. Koperasi
Obyek Kerjasama	Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)	
Kontribusi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Sebagian KPBU 2. Dukungan pemerintah 3. Jaminan pemerintah 	
Pengembalian investasi Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (<i>User Charge</i>). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (<i>Availability Payment</i>). 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. 	
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Konstruksi 5. Masa Konsesi



19 + 1 SEKTOR INFRASTRUKTUR KPBU

FASILITAS SOSIAL



Sarana Olah Raga,
Kesenian dan
Budaya



Pariwisata



Kawasan



Kesehatan



Fasilitas Pendidikan



Lembaga
Pemasyarakatan

FASILITAS PERKOTAAN



Pengelolaan
Sampah



Perumahan
Rakyat



Fasilitas Perkotaan



Pengelolaan Limbah
Setempat



Dapat mengajukan
kepada Menteri PPN/
Bappenas



Jalan



Migas dan EBT



Konservasi
Energi



SDA & Irigasi



Air Minum



Pengelolaan Limbah
Terpusat



Transportasi

KONEKTIVITAS



Ketenagalistrikan

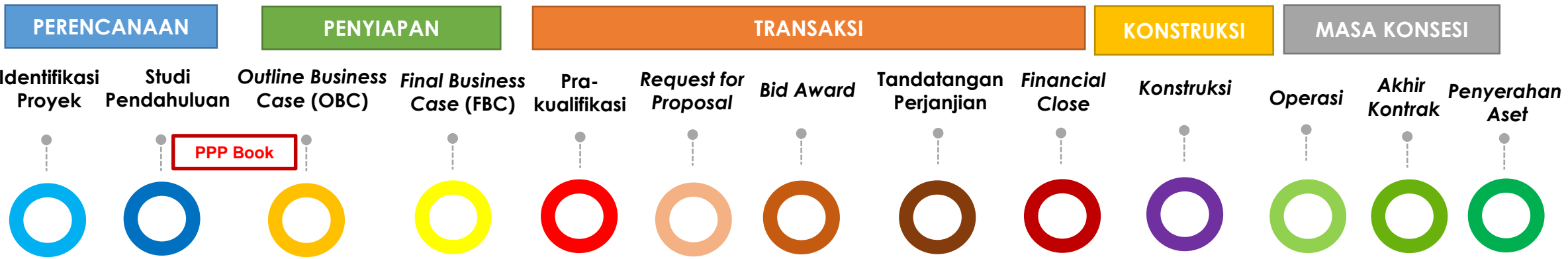


Telekomunikasi &
Informatika



Tahapan KPBU Berdasarkan Pemrakarsa

PRAKARSA PEMERINTAH
(SOLICITED)



Pemrakarsa proyek mengajukan proposal dan dokumen pra-studi kelayakan (FS) ke PJKP

Badan Usaha Pemrakarsa menyerahkan FS

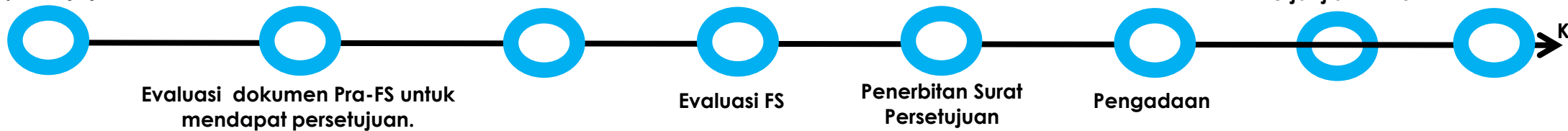
PPP Book

Tandatangan Perjanjian KPBU

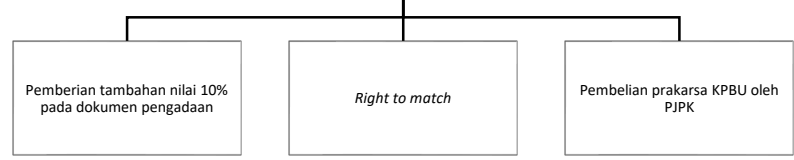
Financial Close

Konstruksi dan Operasi

PRAKARSA BADAN USAHA
(UNSOLICITED)



Pilihan Pemberian Kompensasi kepada Badan Usaha Pemrakarsa



Syarat unsolicited :

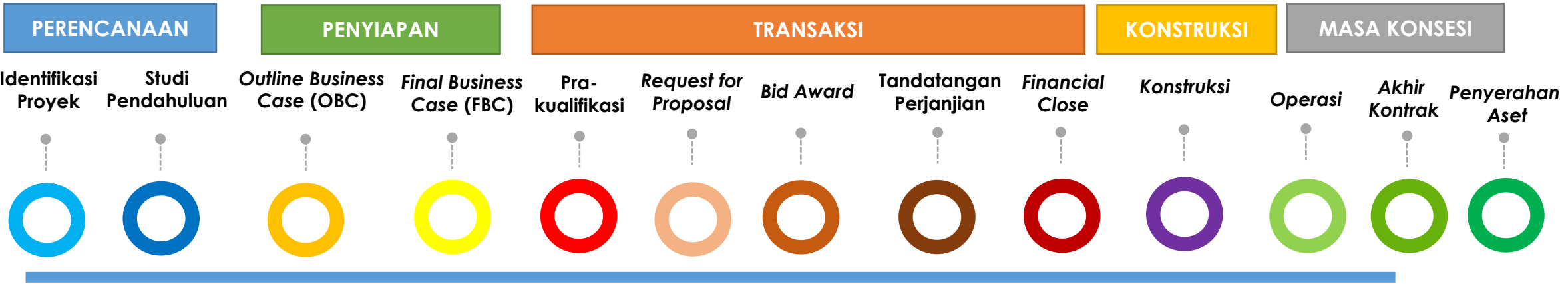
- a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan
- b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai



Peran Kantor Bersama dalam Proses KPBU



PRAKARSIA PEMERINTAH (SOLICITED)



Disiapkan oleh K/L
Didampingi **Bappenas**

Disiapkan oleh K/L
Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF

Bappenas
mengamankan alokasi

Mulai pembayaran AP

BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding

- **LKPP** bertindak sebagai *transaction probity*
- **PT PII** melakukan proses penjaminan pemerintah

Kemendagri
Pertimbangan terhadap dokumen rencana kegiatan KPDBU terkait AP

- VGF Kemenkeu
- DAK
- Dukungan sebagian konstruksi Contoh: SPAM Umbulan

Kemenko Bidang Perekonomian + Kemenko Marinves
Debottlenecking

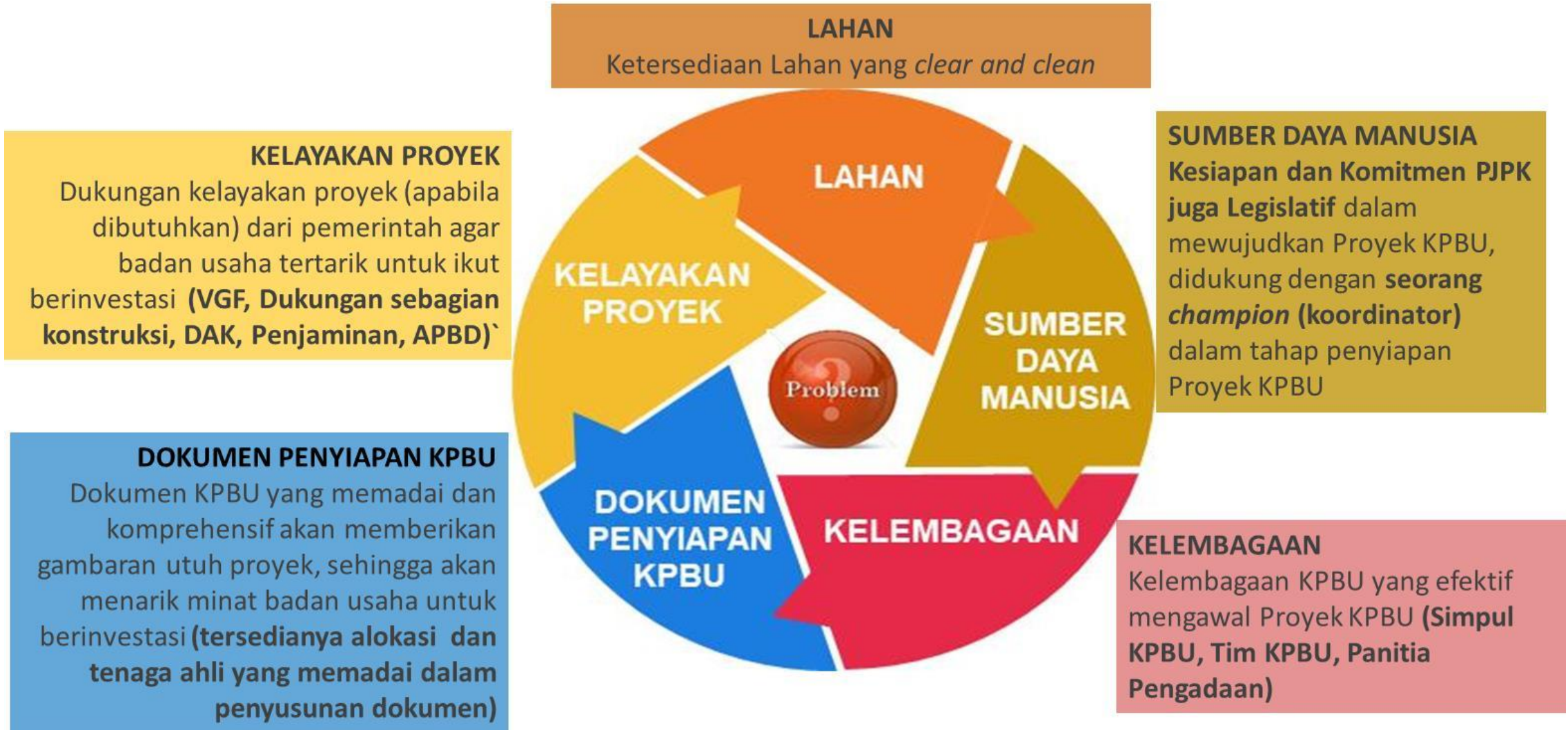
Capacity Building oleh Kantor Bersama KPBU

Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, persiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D



Kunci Sukses Pelaksanaan KPBU

...hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Proyek KPBU...





Hal yang Perlu diperhatikan dalam Proses Pelaksanaan KPBU



Koordinasi

Perlu **koordinator** (Menko/Kantor Bersama) dalam melakukan monitoring dan evaluasi progress pekerjaan, sehingga dapat diantisipasi apabila ada hal-hal yg tidak sesuai dengan rencana.

Mengadakan **Rapat Koordinasi** berjenjang dari Tim, Simpul dan antar daerah, sehingga penyelesaian permasalahan tidak selalu dibawa ke level pusat



Stakeholders Mapping

Menyusun **matriks pemangku kepentingan**, yang paling tidak termasuk didalamnya:
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama,
Offtakers (pemerintah daerah),
Pemberi dukungan (pemerintah pusat), dll.

Serta mengidentifikasi dan memastikan **peran, kewajiban dan tanggung jawab** masing-masing institusi



Dokumen Kajian, Kontrak, Perjanjian

Menyusun **ruang lingkup pekerjaan proyek yang komprehensif** dari hulu sampai hilir baik pengurusan izin, pengadaan lahan, pengerjaan konstruksi dsb.

Menyusun dan membuat **perjanjian antara pemangku kepentingan, kontrak kerjasama yang mencakup standar pelayanan**



Capacity Building

Penguatan pemahaman dalam proses pelaksanaan KPBU, standar dokumentasi proyek, standar perjanjian agar setiap pemangku kepentingan dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam setiap tahapan proyek

Ini akan teridentifikasi dan terkaji dalam kajian Prastudi Kelayakan (OBC & FBC) yang perlu disiapkan oleh PJKP



Percepatan Pelaksanaan KPBU melalui Kantor Bersama KPBU



KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA

PPP Joint Office Government of Indonesia



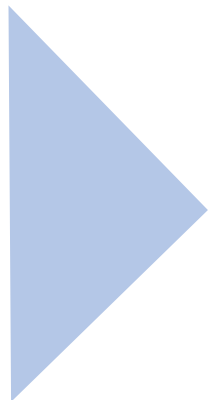
Koordinasi



Fasilitas



Capacity Building



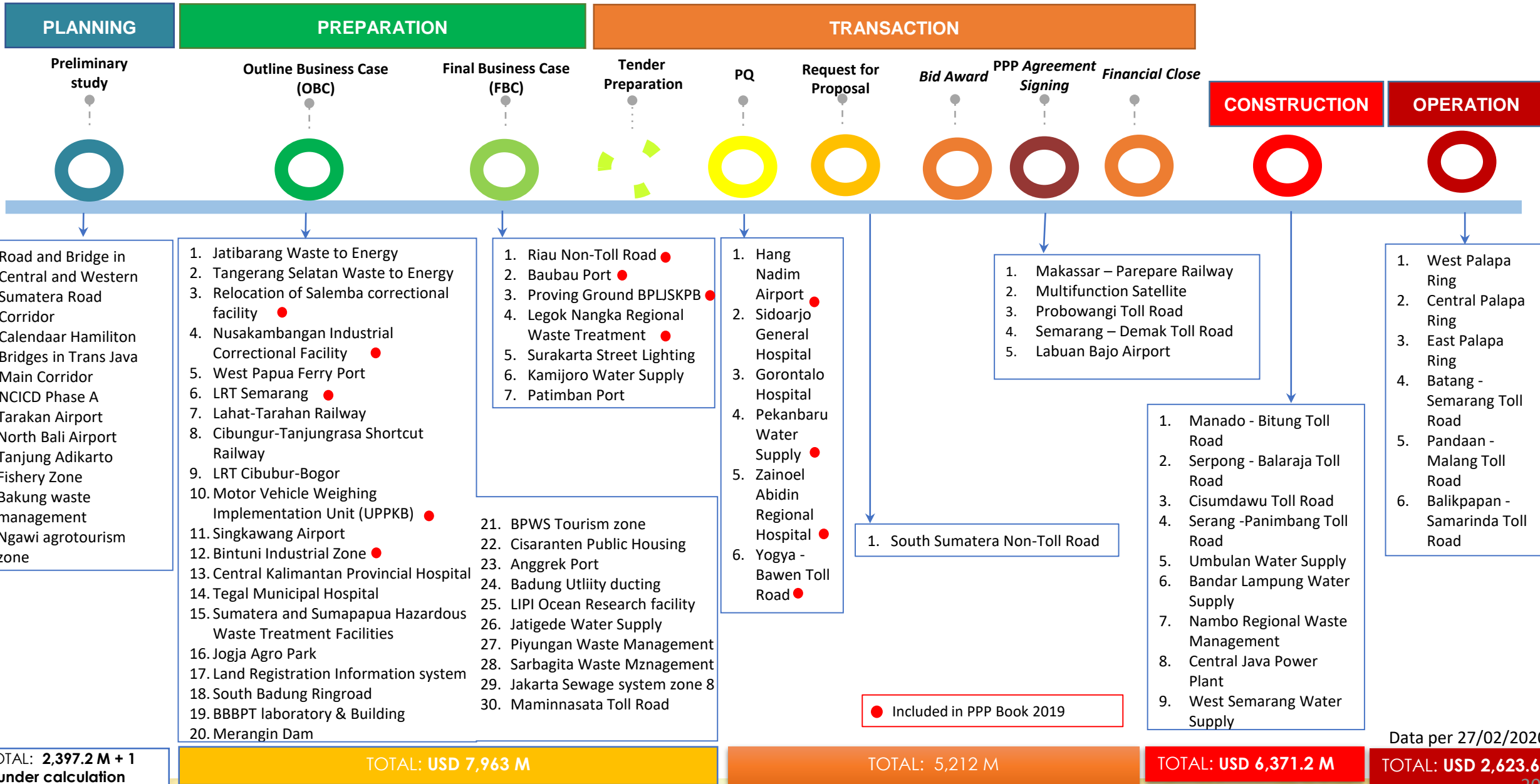
Percepatan Pelaksanaan KPBU di Indonesia



Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta 12710 - Indonesia

Solicited PPP Project Pipeline

6 under operation project, 9 under construction projects, and 59 on progress projects



Unsolicited* PPP Project Pipeline

1 under operation project, 1 under construction projects and 14 on progress projects

Project proponent submits a proposal and pre-FS document to GCA

1. Tanjung Jabung Bridge (US\$ 12.0 million)
2. Karian Water Supply (under calculation)
3. Patimban Subang Regional Water Supply (US\$ 27.8 million)

Pre-FS document evaluation to get pre-FS approval

Business Entity submits FS

1. Karimun Bridge (US\$ 11.9 million)
2. TOD Poris Plawad (US\$ 115.6 million)

FS evaluation

1. Marine Observation and Modeling (US\$ 95.9 million)
2. Sarbagikung Regional Water Supply (US\$ 222.2 million)

Issuing approval letter

1. Jatiluhur I Water Supply (US\$ 133.1 million)
2. Semanan – Balaraja Toll Road
3. Kamal – Teluknaga – Rajeg Toll Road
4. Patimban Port Access Toll Road
5. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll Road

Procurement

1. Balikpapan – Penajam Paser Utara Toll Bridge (US\$ 1,099 million)
2. Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo Toll Road

Agreement Signing

Financial Close

Construction

1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar (US\$ 940 million)
2. Jakarta-Cikampek South Toll Road (US\$ 1,572 million)
3. Dumai Water Supply (US\$ 36.22 million)

Operation

1. Jakarta - Cikampek Elevated II (US\$ 1,718 million)

End of Contract and Assignment of Assets

Evaluation Criteria:



Technically **integrated** with the sector's **master plan**



Economically and financially **viable**



The business entity that proposes the initiative has **adequate financial capability** to finance the project.

*The unsolicited project is when the project is initiated by the private sector



3

USULAN TINDAK LANJUT PROSES IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK KPBU DAERAH



Usulan Tindak Lanjut Proses Implementasi Pelaksanaan Proyek-Proyek KPBU Daerah

Hal – Hal yang harus di tindaklanjuti

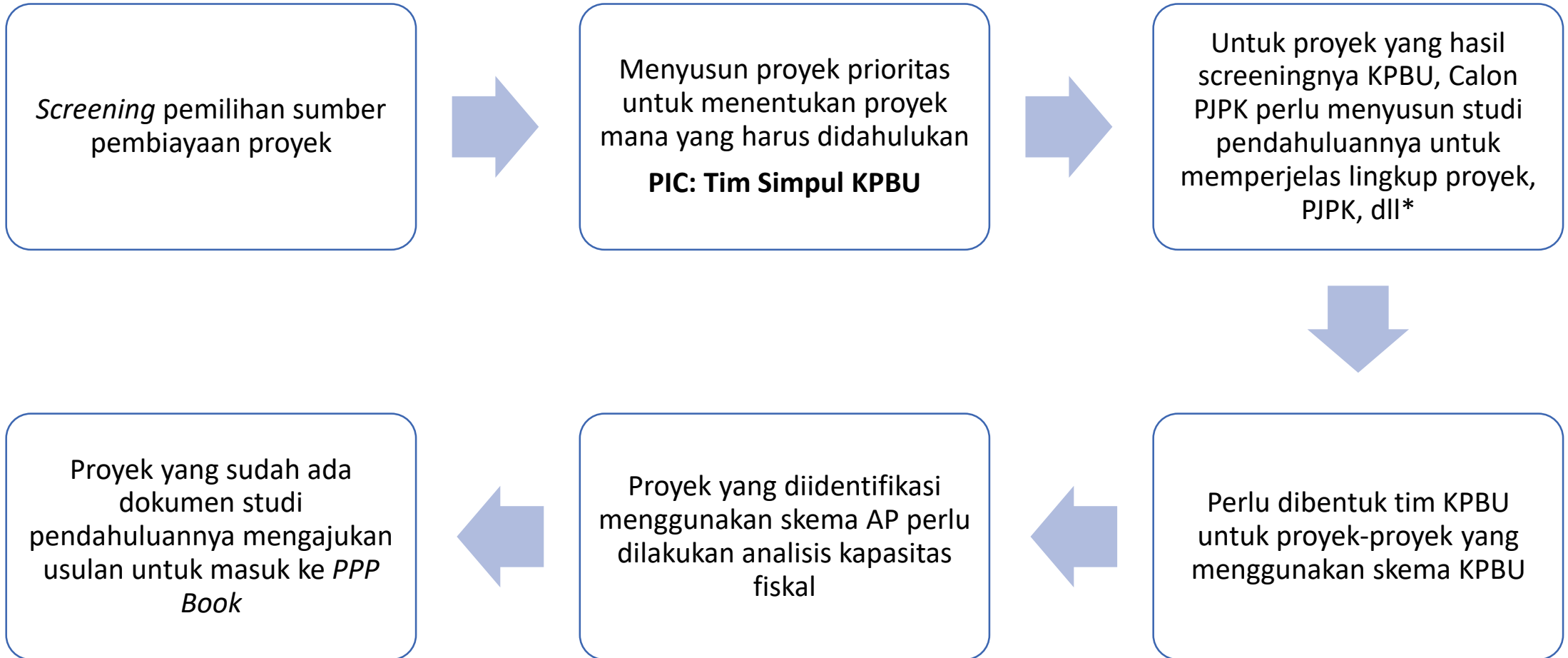
- Beberapa proyek perlu diperjelas ruang lingkungannya, karena ini akan menentukan PJK yang tepat.
- Project yang sudah terkonfirmasi menggunakan skema KPBU dilanjutkan dengan penyusunan Studi Pendahuluan
- Project yang PJK nya masih belum jelas agar dilakukan studi lebih lanjut untuk menentukan PJK
- Perlu diperhitungkan kemampuan fiskal PJK serta dukungan dan fasilitasi yang dibutuhkan dari pemerintah pusat
- Pembentukan Simpul KPBU dan tim KPBU yang akan mengawal proses KPBU.

Follow Up yang akan dilakukan dengan Bappenas

- Rapat Screening proyek KPBU Daerah
- Rapat Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah
- Magang penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU



Usulan Tindak Lanjut Proses Implementasi Pelaksanaan Proyek-Proyek KPBU Daerah



*Dapat difasilitasi pendampingan oleh Bappenas dan Kantor Bersama KPBU



Terima Kasih



5

LAMPIRAN

- MAJOR PROJECT INFRASTRUKTUR

RPJMN 2020-2024



Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Infrastruktur 2020 – 2024 (1)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp T)	No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp T)
10	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah 	<p>466,04</p> <p>[APBN: 90,35; KPBU: 252,46; Badan Usaha: 123,23]</p>	22	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama Meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk <i>loop</i> secara teratur menjadi 27% Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada <i>hinterland</i> 	<p>113</p> <p>(BUMN/Swasta)</p>
19	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam Menjadi enabler bagi pengembangan kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera 	<p>308,5</p> <p>[APBN: 105,5; KPBU: 203,0]</p>	23	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 	<p>118,8</p> <p>(APBN, APBD, Badan Usaha)</p>
20	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	<p>Berkurangnya waktu tempuh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	<p>63,6</p> <p>[APBN: 21,6; KPBU: 42,0]</p>	24	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta <i>Barrel</i> Per Hari di tahun 2026 Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas 	<p>637,0</p> <p>(Badan Usaha)</p>
21	Kereta Api Makassar-Pare Pare	<ul style="list-style-type: none"> Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun) 	<p>6,4</p> <p>[APBN: 3,8; KPBU: 2,6]</p>				



Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Infrastruktur 2020 – 2024 (2)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp T)	No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp T)
25	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	<ul style="list-style-type: none">Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MWMendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%Menyediakan pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 6,07 juta ton CO₂ pada 2024Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	1.121,0 (APBN dan Badan Usaha)	27	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none">Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan CirebonBerkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)	54,9 [APBN: 31,4; KPBU: 18,7; APBD: 4,8]
				28	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none">Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MWTersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan panganMeningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	92,9 [APBN: 12,9; KPBU: 24; Swasta : 60]
				29	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	<ul style="list-style-type: none">Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50%	7,7 [APBN]
26	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none">Berkurangnya kesenjangan digitalMenyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	435,2 [APBN: 7,2; Badan Usaha: 428,0]				



Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Infrastruktur 2020 – 2024 (3)



No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp T)
30	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	12,4 [APBN]
31	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	15,4 [APBN]
32	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	140,9 [APBN: 73,5; APBD: 1,7; Masyarakat/Swasta: 65,7]
33	Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	123,5 [APBN: 77,9; APBD: 15,6; KPBU: 29,9]
34	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) 	397,9 [APBN: 18,0; APBD: 109,2; BUMN: 28,0; Swasta: 237,5; Masyarakat: 5,0]

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp T)
35	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun Berkurangnya import LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun 	38,4 [APBN: 4,1; BUMN: 6,9; KPBU: 27,4]
36	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	30,9 [APBN]
37	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	<ul style="list-style-type: none"> Menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan) Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna 	36,4 [Badan Usaha]